

KATEGORI

Sosial

SUB KATEGORI

keriminalitas

NAMA INDIKATOR

Banyaknya Tahanan di Kejaksaan Negeri di Rinci Per Bulan

TAHUN

2017

KONSEP

- Banyaknya Tahanan di Kejaksaan Negeri di Rinci Per Bulan adalah jumlah tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim di Kejaksaan Negeri yang dirinci per bulan.
- Tahanan di Kejaksaan Negeri adalah jumlah tersangka atau terdakwa yang ditahan oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim di Kejaksaan Negeri.
- Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.
- Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Kejaksaan Negeri (Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.
- Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.
- Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

RUJUKAN

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS- 170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala Dinas Sosial

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya tahanan di Kejaksaan Negeri di suatu daerah

INTERPRETASI

Banyaknya tahanan di Kejaksaan Negeri di suatu daerah menunjukkan tingginya pelanggaran hukum di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kejaksaan Negeri

DOKUMEN

DDA

